BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Perhutani dengan masyarakat di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk adalah kurang adanya komunikasi sosial dengan masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman Perhutani terhadap masyarakat, peraturan Perhutani yang semakin ketat dari waktu ke waktu. Namun dengan adanya kebijakan baru seharusnya juga ada komunikasi sosial antara Perhutani dengan masyarakat, bantuan dari Perhutani yang belum memadai dalam hal memberikan fasilitas bagi para pesanggem yang mengerjakan lahan Perhutani dan menjaga tanaman jati milik Perhutani, kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum tercukupi, membuat masyarakat menggunakan jalan pintas untuk mencuri kayu dan melangga peraturan Perhutani, tingkat sumberdaya manusia yang rendah, sehingga membuat masyarakat tidak ada pekerjaan lain selain mengambil kayu milik perhutani, kurang terjalinnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak Perhutani membuat aspirasi masyarakat tidak diketahui oleh masyarakat. Hal ini diutamakan perlu adanya lembaga masyarakat yang bekerja sama dengan Perhutani yang bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat untuk disampaikan kepada Perhutani

Sedangkan bentuk konflik sosial yang terjadi antara Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah bentuk laten, di mana konflik yang terjadi tidak terlihat dan tidak mencuat. Karena konflik sosial yang terjadi hanya berupa pertentangan keinginan antara individu/ kelompok yang satu dengan individu/ kelompok yang lain. Selama peneliti melakukan pengamatan, peneliti tidak pernah menemukan adanya bentrok, tawuran massal dan kerusuhan lain antara masyarakat dengan Perhutani. Dulu pernah ada demonstrasi besar-besaran ketika awal pemerintahan Megawati. Namun sekarang sudah tidak pernah terjadi semenjak dibentuknya organisasi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Sedangkan menurut taktik keras atau ekskalasinya, bentuk konflik ini termasuk dalam bentuk *Agresor*(Penyerang)-*Defender*(Kelompok Bertahan). Perhutani sebagai kelompok penyerang menggunakan taktik apapun agar tujuan masyarakat Desa Ngumpul memanfaatka sumberdaya hutan secara gratis dan taidak terkendali bisa menjadi searah dengan kepentingan Perhutani untuk menjadikan hutan sebagai lahan reservasi dan penghasilan bagi Perhutani.

Dampak dari adanya konflik mengenai pemanfaatan sumberdaya hutan antara masyarakat Desa Ngumpul dengan Perhutani baik yang dialami oleh pihak Perhutani maupun masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Bagi pihak Pehutani

Akibat adanya konflik antara Perhutani dengan masyarakat, masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan Perhutani. hal ini membuat Perhutani mengalami kerugian. Karena masyarakat sudah tidak mau bekerjasama lagi dengan pihak Perhutani. Selain itu,jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi konflik antara masyarakat dengan Perhutani, akan membuat masyarakat menjadi emosi dan merusak hutan jati milik Perhutani.

b. Bagi masyarakat

Kerugiannya bagi masyarakat adalah masyarakat menjadi kehilangan penghasilan yang bisa mereka dapatkan dari pengelolahan lahan Perhutani dan apabila tidak ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Perhutani. Masyarakat Desa Ngumpul sangat menggantungkan kehidupannya pada keberadaan hutan karena lokasi desa Ngumpul yang berdekatan dengan hutan jati milik Perhutani, maka dari itu apabila kebijakan yang ditetapkan oleh Perhutani tidak dikomunikasikan kepada masyarakat terlebih dahulu masyarakat juga akan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan hutan/ pengerjaan lahan milik Perhutani.

B. Saran (Rekomendasi)

1. Bagi Perhutani

   a. Perlu adanya komunikasi sosial yang bersifat terus menerus antara Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul, supaya masyarakat benar-benar mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Perhutani dalam memanfaatkan hutan.

   b. Dalam melaksanakan tugasnya selama di hutan sebaiknya polisi hutan bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Ketika bertemu dengan masyarakat yang kebetulan sedang berada di hutan, sebaiknya bersikap baik. Supaya masyarakat mau ikut membantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Polisi hutan dalam mencari penebang kayu ilegal dan gangguan keamanan hutan lainnya.

c. Ketika perhutani menangkap masyarakat yang melakukan pencurian, Perhutani tidak hanya melakukan komunikasi sosial tapi juga harus memberikan solusi kepada masyarakat tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun tidak mencuri kayu di hutan.

2. Bagi masyarakat

Menurut Parker, konflik dapat dapat diselesaikan dengan menarik pihak yang terlibat konflik dan menggabungkan mereka ke dalam kelompok yang menjalankan program positif.[85]Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian, bahwa untuk meminimalisir konflik yaitu dengan masyarakat ikut bergabung ke dalam organisasi yang positif seperti LMDH (Lembaga Masyarakat Desa). Supaya masyarakat juga tetap bisa mendapatkan keuntungan dan bisa tetap memanfaatkan kekayaan hutan secara legal dan sesuai dengan aturan Perhutani. Mau tidak mau, masyarakat juga harus tunduk kepada aturan perhutani. Karena pemerintah memberikan kekuasaan kepada Perhutani untuk mengelola, menjaga dan memanfaatkan hutan.

[85] Prof. Dr. Alo Liliweri, *M.s*, *Prasangka Dan Konflik,* (Yogyakarta: PT *LkiS* Pelangi Aksara, 2005) hal 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id